

URGENSI KURIKULUM DAN SISTEM PEMBELAJARAN INKLUSIF GENDER

SITI ZULAIHA
Email: layesfakh0515@gmail.com

DOSEN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH
IBTIDAIYAH FAKULTAS TARBIYAH STAIN CURUP

Abstact

Urgency curriculum and gender inclusive learning system because there are still many gaps in the world of education, especially in three aspects, namely access, participation and benefits and msih lack of participation of female learners in learning, low skill of women in technology mastery, there are still many curriculum and teaching materials that is bias gender and there is still a benefit gap in the curriculum and learning gained by male and female learners. It is the background of the importance of curriculum and gender inclusive learning. The curriculum and inclusive gender learning is a curriculum that integrates gender equality principles (taking into account equality of access, participation, control, benefits, and ensuring no gender discrimination in its various forms), or in curriculum documents in an attempt to achieve social justice. While gender-inclusive learning is learning that recognizes and considers the different needs, interests, experiences, and ways of learning of students and students caused by the construction of gender in their environment. Furthermore, to analyze the implementation of curriculum in gender inclusive learning the author presents the rubric of syllabus analysis and the rubric of analysis of learning implementation plan so that the implementation of learning is in accordance with the principles of gender equality.

Keywords: *Urgency Curriculum, Gender Inclusive Learning*

A. PENDAHULUAN

Isu kesenjangan gender saat ini masih banyak dalam dunia pendidikan. Ada tiga aspek permasalahan gender dalam pendidikan yaitu : 1) akses (fasilitas pendidikan yang sulit dicapai), 2). Partisipasi (tercakup dalam bidang studi dan statistik pendidikan), 3) manfaat dan penguasaan (banyaknya buta huruf dialami oleh perempuan). (Elfi Muawanah : 2009 : 54).

Lebih lanjut permasalahan gender lainnya masih kurangnya partisipasi peserta didik perempuan, rendahnya keterampilan perempuan dalam penguasaan teknologi, masih banyaknya kurikulum dan buku ajar yang bias gender, dan masih

urgensi kurikulum dan sistem pembelajaran inklusif gender

terdapat kesenjangan manfaat yang diperoleh dari pendidikan antara peserta didik laki-laki dan perempuan. Perubahan pola pikir (*mainset*) masyarakat akan lebih mudah dicapai melalui proses yang terencana, terprogram, dan terukur. Dalam hal ini, dunia pendidikan melalui kebijakan pendidikan yang berperspektif dan inklusifgender yang didukung oleh pemegang kebijakan di bidang pendidikan, penyelenggara pendidikan, dan pelaksana-khususnya para pendidik, memegang peran yang sangat penting. Oleh karena itu, di samping adanya kebijakan pendidikan yang berperspektif dan inklusifgender, perencanaan, proses, dan evaluasi yang dilakukan juga harus inklusifgender. (Bambang Santoso, *Implementasi Kesetaraan Gender dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia* <https://bambang santoso.wordpress.com/2011/12/02/implementasi-kesetaraan-jender-dalam-pembelajaran-bahasa-indonesia/>, diakses 20 November 2017)

Dalam Acuan Operasional Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) disusun dengan memperhatikan salah satunya kesetaraan Gender. (Khaeruddin & Mahfud Junaedi : 2007: 84). Hal ini menunjukkan bahwa sudah seyogyanya para pengembang dan pelaksana kurikulum harus mengintegrasikan gender ke dalam kurikulum dan perencanaan, proses, dan evaluasi pembelajaran sesuai dengan kompetensi dan indikator yang telah ditetapkan. Dari penjelasan tersebut tulisan ini akan membahas bagaimana konsep kesetaraan gender dalam kurikulum dan sistem pembelajaran.

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Gender

Menurut Nasarudin Umar dalam buku Muhammad Thobroni dan Arif Mustofa mengatakan bahwa gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Selanjutnya Priyono menegaskan konsep ini merujuk pada pemahaman identitas, peran, fungsi, pola perilaku, kegiatan, dan persepsi naik tentang perempuan maupun laki-laki ditentukan oleh masyarakat dan kebudayaan tempat mereka dilahirkan dan dibesarkan. Kemudian Mansour Fakih mengemukakan bahwa gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi sosial maupun kultural. (Muhammad Thobroni & Arif Mustofa : 2011: 435).

2. Bentuk-bentuk diskriminasi Gender

a. Marginalisasi (peminggiran)

Peminggiran banyak terjadi dalam bidang ekonomi. Misalnya, banyak perempuan hanya mendapatkan pekerjaan yang tidak terlalu bagus, baik dari segi gaji, jaminan kerja, ataupun status dari pekerjaan yang didapatkan.

b. Subordinasi (penomorduaan)

Anggapan bahwa perempuan lemah, tidak mampu memimpin, cengeng, dan lain sebagainya, yang menyebabkan perempuan jadi nomor dua setelah laki-laki.

c. Stereotipe (citra buruk)

Pandangan buruk terhadap perempuan. Contohnya : perempuan pulang larut malam adalah pelacur, jalang, dan lain sebagainya.

d. Violence (kekerasan)

Serangan fisik dan psikis.

e. Beban kerja berlebihan

Beban kerja berlebihan, yaitu tugas dan tanggung jawab perempuan yang berat dan terus menerus. (Muhammad Thobroni & Arif Mustofa : 2011: 437).

3. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender di Indonesia tertuang dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, yang isinya presiden menginstruksikan kepada seluruh Departemen dan Lembaga Non Departemen di tingkat Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota untuk :

Pertama, melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. *Kedua*, memperhatikan secara sungguh-sungguh pedoman pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional sebagaimana terlampir dalam instruksi Presiden ini sebagai acuan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender. *Ketiga*, memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender. *Keempat*, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing *urgensi* kurikulum dan sistem pembelajaran inklusif gender

menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden. (Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia : 2004 : 153-155).

Kemudian dalam lampiran Inpres No. 9 Tahun 2000, dijelaskan pula tentang analisa gender merupakan proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.

Analisis gender dilakukan dengan memperhatikan empat faktor kesenjangan gender, yaitu :

- a. Faktor akses. Apakah perempuan dan laki-laki memperoleh akses yang sama terhadap sumber daya pembangunan (termasuk sumber daya pendidikan);
- b. Faktor partisipasi. Apakah perempuan dan laki-laki berpartisipasi dalam program-program pembangunan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan.
- c. Faktor kontrol. Apakah perempuan dan laki-laki memiliki kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan (termasuk sumber daya pendidikan);
- d. Faktor manfaat. Apakah perempuan dan laki-laki menikmati manfaat yang sama dari hasil pembangunan (termasuk pembangunan pendidikan). (Dinas Pendidikan Provinsi di Yogyakarta : 2008 : 16-17)

Perencanaan pembangunan yang inklusifgender harus dilakukan oleh pengelola pembangunan di semua tingkatan, baik provinsi maupun Kabupaten/Kota. Untuk menjamin keberlangsungan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan inklusifgender, maka perspektif gender harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan pendek. Dengan demikian, perencanaan pembangunan inklusifgender dilakukan dalam upaya untuk memperkecil kesenjangan gender yang terjadi di berbagai bidang pembangunan (termasuk pendidikan) harus dituangkan secara jelas di dalam dokumen perencanaan.

Salah satu analisis yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pendidikan adalah *Gender Analysis Pathway* (GAP).

4. Kurikulum dan Sistem Pembelajaran

Pengembangan kurikulum dan pembelajaran merupakan salah satu aspek pendidikan yang dalam manajemen berbasis madrasah pengembangannya dilimpahkan kepada daerah dan madrasah, tentu saja bagi daerah dan madrasah yang sudah mapan, memiliki kemauan, dan kemampuan untuk mengembangkan kurikulum sendiri, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Sebagai rambu-rambu manajemen kurikulum dan program pembelajaran ini, penyusunan kurikulum harus memperhatikan :

- a. Peningkatan iman dan takwa;
- b. Peningkatan akhlak mulia;
- c. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
- d. Keragaman potensi daerah dan lingkungan;
- e. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
- f. Tuntutan dunia kerja;
- g. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- h. Dinamika perkembangan global; dan
- i. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. (Depag RI : 2005: 26)

Dalam MBM kurikulum menempatkan siswa didik sebagai *primary customer* (pelanggan utama). Karena itu, pihak pengurus madrasah harus mampu mengambil dan menerjemahkan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan relevan dengan lingkungan di mana siswa berada pada saat itu.

Secara operasional, manajemen kurikulum dan sistem pembelajaran menyangkut tiga fungsi manajerial, yaitu :

- a. Perencanaan menyangkut tujuan dan memperkirakan cara pencapaian tujuan tersebut.
- b. Pelaksanaan merupakan proses yang memberikan kepastian bahwa proses belajar mengajar telah memiliki sumber daya manusia dan sarana prasarana yang diperlukan, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
- c. Pengendalian atau disebut juga evaluasi dan pengendalian, bertujuan menjamin kinerja yang dicapai sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan. (Depag RI : 2005: 26)

Kepala madrasah merupakan seorang manajer di madrasah, yang bertanggungjawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian perubahan atau perbaikan program pembelajaran. Terdapat empat langkah yang harus dilakukan oleh kepala madrasah dalam hal ini, yaitu menilai kesesuaian program yang ada dengan tuntutan kebudayaan dan kebutuhan peserta didik, meningkatkan perencanaan program, memilih dan melaksanakan program, serta menilai perubahan program.

Untuk menjamin efektivitas pengembangan kurikulum dan sistem pembelajaran, kepala madrasah sebagai pengelola program pembelajaran bersama tenaga kependidikan lain harus menjabarkan isi kurikulum secara lebih rinci dan operasional ke dalam program tahunan, semester, dan bulanan. Untuk program mingguan atau program satuan pelajaran, wajib dikembangkan guru sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Berikut beberapa prinsip yang harus diperhatikan :

- a. Tujuan yang hendak dicapai harus jelas, makin operasional tujuan, makin mudah terlihat dan makin tepat program-program yang dikembangkan untuk mencapai tujuan.
- b. Program itu harus sederhana dan fleksibel.
- c. Program-program yang disusun dan dikembangkan harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- d. Program yang dikembangkan harus menyeluruh dan harus jelas pencapaiannya.
- e. Harus ada koordinasi antar komponen pelaksana program di madrasah.
(Depag RI : 2005: 29)

5. Kurikulum dan Pembelajaran Inklusif Gender

Implementasi manajemen berbasis madrasah yang inklusif gender dalam kaitannya dengan manajemen kurikulum sebagaimana yang dicanangkan dalam tujuh prinsip pengembangan KTSP, prinsip pengembangan kurikulum yang kedua bermuatan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender. Prinsip tersebut dinyatakan sebagai berikut :

“kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.” (Khairuddin & Mahfud Junaedi : 2007 : 84)

Acuan operasional penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan harus disusun dengan memperhatikan salah satunya yaitu : “kesetaraan gender. Kurikulum harus diarahkan kepada terciptanya pendidikan yang berkeadilan dan memperhatikan kesetaraan gender.” (Khairuddin & Mahfud Junaedi : 2007 : 80)

Lebih lanjut dalam modul pembelajaran inklusif gender dijelaskan bahwa kurikulum inklusif gender yaitu kurikulum yang mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan gender (memperhatikan kesamaan akses, partisipasi, kontrol, manfaat, dan memastikan tidak ada diskriminasi gender dalam berbagai bentuknya), atau dalam dokumen kurikulum sebagai upaya untuk mencapai keadilan sosial. (LAPIS: 2010 : xi).

Pembelajaran yang inklusif gender yaitu pembelajaran yang mengakui dan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan, minat, pengalaman, dan cara belajar siswa dan siswi disebabkan oleh konstruksi gender pada lingkungannya. Tujuan Pembelajaran Inklusif Gender agar perbedaan konstruksi gender laki-laki dan perempuan sama-sama diakui dan dihargai, serta akomodatif pada keduanya untuk menciptakan kesetaraan gender, yakni : Keduanya memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama dalam belajar. Untuk mencapai keadilan gender : siswa dan siswi mendapatkan hak-hak dalam belajar secara adil, agar keduanya dapat belajar secara aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. (Mufidah dalam [/www.slideshare.net/yulestian/matei-dari-bu-mufida-presentation](http://www.slideshare.net/yulestian/matei-dari-bu-mufida-presentation), diakses pada tanggal 12 Oktober 2017).

Adapun landasannya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB II Pasal 3 mengisyaratkan bahwa dalam pendidikan peserta didik (tanpa dibedakan) dituntut secara aktif untuk mengembangkan potensi dirinya. Perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan yang bermutu juga ditegaskan dalam Bab IV Pasal 5 sebagai berikut :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. “Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat”. (Citra Umbara : 2009:64-65)

Secara rinci pembelajaran inklusif gender meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Prinsip-prinsip Menuju Pembelajaran Inklusif Gender
 - 1) Strategi Pembelajaran
 - a) *Problem Solving*
 - b) *Discovery-inquiry learning*
 - c) *Contextual teaching learning*
 - d) *Individualize learning*
 - b. Manajemen Kelas Berbasis Kesetaraan Gender
 - 1) Mempertimbangkan adanya perbedaan gender dan pengaruhnya dalam manajemen kelas.
 - 2) Menumbuhkan sikap “mampu melakukan” tugas-tugas yang sama bagi siswa dan siswi.
 - 3) Mendorong partisipasi siswa dan siswi dalam porsi yang sama termasuk dalam kepemimpinan dan kerja kelompok.
 - 4) Untuk menguatkan diri siswa dan siswi.
 - c. Media Pembelajaran
 - 1) Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai
 - 2) Tepat untuk menyampaikan materi pelajaran.
 - 3) Praktis dan luwes
 - 4) Guru mampu memilih dan terampil memanfaatkan media
 - 5) Memiliki mutu yang tinggi
 - 6) Dibuat oleh guru yang telah sensitif gender
 - d. Evaluasi Pembelajaran
 - 1) Mengacu kepada indikator kesetaraan gender
 - 2) Menghindari diskriminasi gender.

- 3) Menggunakan penilaian beragam.
- 4) Memperhatikan perbedaan siswa-siswi yang disebabkan konstruksi sosial yang bias gender.
- 5) Melibatkan orang tua siswa-siswi (ayah dan ibu secara seimbang)
- 6) Mampu menumbuhkan sikap positif bagi siswa-siswi
- 7) Dapat mendorong siswa-siswi mampu melakukan penilaian dirinya sendiri
- 8) Dapat digunakan untuk upaya perubahan bias gender menuju sensitif gender
- 9) Bersifat kontinyu, agar mudah teridentifikasi jika terjadi kesenjangan gender antara keduanya dan menentukan alternatif solusinya.

Sebagai acuan analisis akses, partisipasi, kontrol, manfaat dalam kurikulum yang meliputi : silabus, RPP dan kegiatan belajar mengajar di kelas. Penulis menggunakan acuan berupa rubrik analisis silabus, RPP dan kegiatan belajar mengajar inklusif gender sebagai berikut :

a. Rubrik Analisis Silabus Inklusif Gender yang meliputi :

- 1) Aspek penilaian meliputi :
 - a) Rumusan Kompetensi Dasar
 - b) Indikator
 - c) Materi pokok
 - d) Kegiatan belajar mengajar (mencakup tiga tahap : Eksplorasi, Elaborasi dan Konfirmasi).
 - e) Penilaian dan
 - f) Pengembangan bahan ajar
- 2) Aspek kesetaraan meliputi :
 - a) Akses
 - b) Partisipasi
 - c) Kontrol
 - d) Manfaat
- 3) Indikator meliputi hal-hal yang menunjukkan aspek kesetaraan atau penjabaran dan aspek kesetaraan yang meliputi setiap aspek penilaian kemudian dijabarkan dalam indikator yang ingin dicapai dan ini akan dijadikan analisis lebih lanjut berkaitan dengan silabus.

- 4) Keterangan berupa ada atau tidak aspek-aspek seperti yang disebutkan di atas, dan analisisnya.
- b. Rubrik Analisis Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Inklusif Gender yang meliputi :
 - 1) Aspek penilaian meliputi :
 - a) Standar kompetensi dan kompetensi dasar
 - b) Tujuan pembelajaran
 - c) Indikator
 - d) Pengembangan materi dan bahan ajar
 - e) Metode pembelajaran
 - f) Sumber belajar/media
 - 2) Aspek kesetaraan
 - a) Akses
 - b) Partisipasi
 - c) Kontrol
 - d) Manfaat
 - 3) Indikator yang meliputi penjabaran dari setiap aspek penilaian dan kesetaraan yang memperhatikan aspek kesetaraan secara ekspilist dalam penyusunan RPP, pada setiap tahapan-tahapannya.
 - 4) Keterangan dan analisis dokumen RPP yang ada.
- c. Rubrik Observasi Pembelajaran Inklusif Gender meliputi :
 - 1) Tahap/aspek pembelajaran meliputi :
 - a) Apersepsi
 - b) Kegiatan inti : eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi
 - c) Penggunaan media
 - d) Metode pembelajaran : metode dan pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran di kelas.
 - e) Ujaran/perilaku Guru : penggunaan ungkapan, kalimat, ekspresi, gestur (bahasa tubuh), respon guru selama dalam proses pembelajaran
 - f) Penutup : kesimpulan dan refleksi
 - g) Pengelolaan kelas : penataan ruang/tempat duduk.
 - 2) Aspek kesetaraan meliputi :

- a) Akses
 - b) Partisipasi
 - c) Kontrol
 - d) Manfaat
- 3) Indikator yang meliputi setiap tahap/aspek pembelajaran harus memperhatikan aspek-aspek kesetaraan.
- 4) Keterangan dan Komentar. (PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2009)
 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada rubrik berikut ini :

RUBRIK ANALISIS SILABUS INKLUSIF GENDER

Nama Sekolah :

Kelas/Semester :

No.	Aspek Penilaian	Aspek Kesetaraan	Indikator	Ya/Tidak	Keterangan
1	Rumusan Kompetensi Dasar	Akses	Secara eksplisit menyebutkan bahwa kompetensi dasar yang akan dicapai menjamin keterbukaan kesempatan yang sama bagi siswa-siswi		
		Partisipasi	Menjamin keterlibatan siswa-siswi dalam proses belajar mengajar.		
		Kontrol	Memungkinkan siswa-siswi memperoleh kemampuan untuk mengambil keputusan dalam proses belajar mengajar		
		Manfaat	Siswa-siswi mendapatkan manfaat dari kompetensi dasar (dapat mencapai kompetensi) secara		

			seimbang		
2	Indikator	Akses	Secara eksplisit menyebutkan siswa dan siswi		
		Partisipasi	Mempertimbangkan pengalaman dan kecenderungan siswa dan siswi agar dapat menjamin keterlibatan yang sama bagi siswa-siswi .		
		Kontrol	Memungkinkan siswa-siswi mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengambil keputusan dalam proses belajar mengajar		
		Manfaat	Siswa-siswi mendapatkan manfaat dari kompetensi dasar (dapat mencapai kompetensi) secara seimbang		
3	Materi Pokok	Akses	Materi pokok menggambarkan adanya pemberian kesempatan yang sama bagi siswa-siswi dalam berbagai aspek kehidupan dalam keluarga, masyarakat dan negara		
		Partisipasi	Menunjukkan adanya keterlibatan siswa-siswi. Misalnya : tema “rumahku” untuk kelas awal mencakup tugas		

			anggota keluarga yang seimbang dan tidak streatip		
		Manfaat	Materi ajar mengandung kemanfaatan yang dapat diperoleh oleh siswa-siswi secara seimbang		
4	Kegiatan belajar (mencakup tiga tahap : Eksplorasi, Elaborasi, dan Konfirmasi)				
a.	Eksplorasi	Kegiatan untuk menggali : memberdayakan seluruh indranya untuk menggali pengetahuan yang dimiliki siswa-siswi			
		Akses	Siswa dan siswi memperoleh kesempatan yang sama untuk menggali, berbagi pengalaman dan pikiran masing-masing tentang objek pembelajaran		
		Partisipasi	Mendorong siswa dan siswi terlibat/berperan aktif dalam proses menggali, berbagi pengalaman dan pikiran tentang objek pembelajaran		
		Kontrol	Siswa dan siswi berhak menentukan atau memilih jenis dan objek pengetahuan atau pengamatan secara seimbang		
		Manfaat	Siswa-siswi memperoleh hasil belajar yang sama dari proses penggalian		
b.	Elaborasi	Menganalisis, mempertajam, apa yang ditemukan dalam eksplorasi, mempetakan dan mengklasifikasi.			

		Akses	Siswa-siswi mendapatkan kesempatan yang sama dalam menganalisis, mempertajam, mempetakan atau mengklasifikasi pengetahuan yang telah digali secara bersama-sama		
		Partisipasi	Siswa-siswi terlibat dalam menganalisis, mempertajam, mempetakan atau mengklasifikasi pengetahuan yang telah digali secara bersama-sama.		
		Kontrol	Siswa-siswi memiliki keleluasaan dalam menganalisis hasil elaborasi		
		Manfaat	Siswa-siswi memiliki kemandirian yang sama dari proses elaborasi		
c.	Konfirmasi	Menyimpulkan dan memberikan umpan balik serta penguatan			
		Akses	Siswa-siswi diberi kesempatan untuk menyimpulkan dan mendapatkan umpan balik dari guru maupun dari teman tentang tugas yang dikerjakan		
		Partisipasi	Mendorong siswa-siswi dapat terlibat dalam proses penyimpulan dan pemberian umpan balik secara seimbang		

		Kontrol	Siswa-siswi dapat mengutarakan dan mempertahankan argumentasi dalam proses penyimpulan dan pemberian umpan balik		
		Manfaat	Siswa-siswi mencapai kompetensi yang sama dalam membuat keputusan dan memberikan umpan balik dari apa yang dikerjakan secara seimbang		
5	Penilaian	Instrumen yang dapat mengukur hasil belajar siswa-siswi yang memiliki kecenderungan dan latar belakang berbeda			
		Akses	Instrumen yang digunakan mengukur seluruh kompetensi dasar yang wajib dikuasai siswa-siswi <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi dasar olahraga tertentu tidak dinilai pada siswi karena tidak diberi akses seperti sepak bola, renang, dan lain-lain karena masalah kepatutan budaya 		
		Partisipasi	Instrumen yang mendorong keterlibatan penuh siswa-siswi tanpa rasa takut dan kecemasan		
		Kontrol	Siswa-siswi mengetahui proses dan hasil penilaian secara seimbang		
		Manfaat	Siswa-siswi dapat memperoleh hasil		

			penilaian seimbang untuk memperbaiki diri dalam proses belajar (remidi bagi mereka yang tertinggal)		
--	--	--	---	--	--

Adapun rubrik analisis Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pembelajaran inklusif gender sebagai berikut :

RUBRIK ANALISIS RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN INKLUSIF GENDER

Nama Sekolah :

Guru Penyusun :

No	Aspek Penilaian	Aspek Kesetaraan	Indikator	Y/T	Keterangan
1	SK-KD	Akses	Secara eksplisit menyebutkan bahwa kompetensi dasar yang akan dicapai menjamin keterbukaan kesempatan yang sama bagi siswa-siswi		
		Partisipasi	Menjamin keterlibatan siswa-siswi dalam proses belajar mengajar		
		Kontrol	Memungkinkan siswa-siswi memperoleh kemampuan untuk mengambil keputusan dalam proses belajar mengajar		
		Manfaat	Siswa-siswi mendapatkan manfaat dari kompetensi dasar (dapat mencapai kompetensi) secara seimbang		
2	Tujuan Pembelajaran	Akses	Secara jelas/eksplisit menyebutkan bahwa tujuan belajar menjamin keterbukaan kesempatan yang sama bagi siswa-siswi		

		Partisipasi	Menjamin keterlibatan siswa-siswi dalam memperoleh hasil belajar		
		Kontrol	Memungkinkan siswa-siswi memperoleh kemampuan untuk mengambil keputusan dalam proses belajar mengajar		
		Manfaat	Sesuai dengan kompetensi dalam proses belajar mengajar		
3	Indikator	Akses	Secara eksplisit menyebutkan siswa dan siswi		
		Partisipasi	Mempertimbangkan pengalaman dan kecenderungan siswa dan siswi agar dapat menjamin keterlibatan yang sama bagi siswa-siswi.		
		Kontrol	Memungkinkan siswa-siswi mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengambil keputusan dalam proses belajar mengajar		
		Manfaat	Siswa dan siswi mendapatkan manfaat dari kompetensi dasar (dapat mencapai kompetensi) secara seimbang.		
4	Pengembangan Materi dan Bahan Ajar	Akses	Menyajikan narasi/gambar/ilustrasi tentang kesempatan yang sama bagi siswa/siswi dalam berbagai aspek kehidupan dalam		

			keluarga, masyarakat dan negara, dan tidak melanggengkan nilai-nilai stereotipe secara kualitatif dan kuantitatif. Menyajikan/memuat narasi/gambar/ilustrasi tentang keterlibatan laki-laki dan perempuan secara seimbang baik di wilayah publik maupun domestik		
		Kontrol	Menyajikan/memuat berbagai narasi/gambar/ilustrasi tentang proses pengambilan keputusan dan tokoh-tokoh penting dalam bidang politik, pemerintahan dan pengambil keputusan publik yang seimbang antara laki-laki dan perempuan		
		Manfaat	Mengandung kemanfaatan yang dapat diperoleh oleh siswa-siswi secara seimbang		
5	Metode Pembelajaran	Akses	Menerapkan metode belajar kontekstual dan relevan dengan lingkungan budaya siswa-siswi		
		Partisipasi	Menggunakan metode belajar yang bervariasi sehingga mendorong siswa-siswi terlibat secara seimbang pada aktifitas belajar yang kooperatif dan kompetitif		
		Kontrol	Menerapkan metode belajar yang dapat menumbuhkan kapasitas pengambilan		

			keputusan secara seimbang seperti penentuan menjadi ketua kelompok, menetapkan tema diskusi, dan lain-lain.		
6	Sumber Belajar/Media	Akses	Narasi/gambar/ilustrasi/narasi sumber atau sumber belajar lainnya memungkinkan siswa-siswi memperoleh peluang yang sama tanpa ada hambatan, pembakuan peran/pelabelan.		
		Partisipasi	Sumber belajar memungkinkan siswa-siswi terlibat aktif tanpa pembakuan peren gender : ketua kelompok harus siswa (laki-laki). Totulensi diberikan pada siswi (perempuan), dan lain-lain.		
		Kontrol	Sumber belajar, termasuk narasumber harus dapat mendorong siswa-siswi mengembangkan kemampuan pengambilan keputusan yang seimbang. Misalnya : narasumber dari tokoh politik/pemerintahan/ak ademisi atau lainnya diupayakan seimbang (laki-laki dan perempuan) agar menjadi contoh/teladan bagi keduanya.		
		Manfaat	Sumber belajar harus dapat membantu siswa-siswi memperoleh hasil belajar secara seimbang		

C. KESIMPULAN

Kurikulum dan pembelajaran inklusif gender sudah menjadi keharusan. Hal ini dikarenakan selain tuntutan keadilan sosial juga sesuai dengan tuntutan secara tersirat dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan. Kurikulum dan sistem pembelajaran inklusif gender mengacu kepada prinsip penyusunan kurikulum itu sendiri dan juga prinsip-prinsip kesetaraan gender (memperhatikan kesamaan akses, partisipasi, kontrol, manfaat, dan memastikan tidak ada diskriminasi gender dalam berbagai bentuknya), atau dalam dokumen kurikulum sebagai upaya untuk mencapai keadilan sosial. Sedangkan pembelajaran yang responsif atau inklusif gender yaitu pembelajaran yang mengakui dan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan, minat, pengalaman, dan cara belajar siswa dan siswi disebabkan oleh konstruksi gender pada lingkungannya.

Secara rinci pembelajaran inklusif gender meliputi : prinsip-prinsip menuju pembelajaran inklusif gender yaitu : a. Strategi pembelajaran yang meliputi : *Problem Solving, Discovery-Inquiry Learning, Contextual Teaching Learning, Individualize Learning*. b. Manajemen kelas berbasis kesetaraan gender yang meliputi : mempertimbangkan adanya perbedaan gender dan pengaruhnya dalam manajemen kelas, menumbuhkan sikap “mampu melakukan” tugas-tugas yang sama bagi siswa dan siswi, mendorong partisipasi siswa dan siswi dalam porsi yang sama termasuk dalam kepemimpinan dan kerja kelompok, untuk menguatkan diri siswa dan siswi. c. Media Pembelajaran yang meliputi : sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, tepat untuk menyampaikan materi pelajaran, praktis dan luwes, guru mampu memilih dan terampil memanfaatkan media, memiliki mutu yang tinggi, dibuat oleh guru yang telah sensitif gender. d. Evaluasi Pembelajaran yang meliputi : mengacu kepada indikator kesetaraan gender, menghindari diskriminasi gender, menggunakan penilaian beragam, memperhatikan perbedaan siswa-siswi yang disebabkan konstruksi sosial yang bias gender, melibatkan orang tua siswa-siswi (ayah dan ibu secara seimbang), mampu menumbuhkan sikap positif bagi siswa-siswi, dapat mendorong siswa-siswi mampu melakukan penilaian dirinya sendiri, dapat digunakan untuk upaya perubahan bias gender menuju sensitif gender, bersifat kontinyu agar *urgensi* kurikulum dan sistem pembelajaran inklusif gender

mudah teridentifikasi jika terjadi kesenjangan gender antara keduanya dan menentukan.

D. DAFTAR PUSTAKA

Acuan Pengembangan Silabus, RPP dan Observasi Pembelajaran Inklusif Gender yang Disusun Oleh PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.

Bambang Santoso. *Implementasi Kesetaraan Gender dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia*

Depag RI. 2005. *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*. Depag RI Dirjen Kelembagaan Agama Islam. Jakarta .

Dinas Pendidikan Provinsi di Yogyakarta. 2008. *Position Paper Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Ygyakarta*. Diknas Provinsi di Yogyakarta. Yogyakarta .

Elfi Muawanah. 2009. *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*. TERAS. Yogyakarta .

<https://bambangsantoso.wordpress.com/2011/12/02/implementasi-kesetaraan-jender-dalam-pembelajaran-bahasa-indonesia/>. diakses 20 November 2017

Khaeruddin & Mahfud Junaedi. 2007. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan . Konsep dan Implementasinya di Madrasah*. Pilar Media. Yogyakarta .

LAPIS. 2010. *Modul Pembelajaran Inklusif Gender*. LAPIS. Jakarta .

Mufidah dalam /www.slideshare.net/yulestian/matei-dari-bu-mufida-presentation. diakses pada tanggal 12 Oktober 2017.

Muhammad Thobroni & Arif Mustofa. 2011. *Belajar & Pembelajaran*. Ar-Ruzz Media. Jogyakarta .

Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indosensia. 2004. *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta .

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 dan Bab IV Pasal 5. 2009. Citra Umbara. Bandung .